

**PERAN PEMERINTAH DALAM MENDORONG KUALITAS
PELAYANAN PENDIDIKAN DI INDONESIA**
*THE GOVERNMENT'S ROLE IN ENCOURAGING THE QUALITY OF
EDUCATION SERVICES IN INDONESIA*

Dodi Ilham¹, Muh. Rizal S², R Luki Karunia³, Sirajuddin Saleh⁴, Joko Tri Brata⁵

¹Institut Agama Islam Negeri Palopo, Indonesia, ²Universitas Negeri Makassar, Indonesia

³Politeknik STIA LAN Jakarta, Indonesia, ⁴Universitas Negeri Makassar, Indonesia

⁵Universitas Sulawesi Tenggara, Indonesia

Email: dodi@iainpalopo.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran krusial pemerintah dalam memajukan kualitas pelayanan pendidikan sebagai latar belakang kebutuhan pendidikan yang berkualitas untuk kemajuan suatu negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menginvestigasi peran pemerintah dalam konteks pendidikan, termasuk pembiayaan, regulasi, kurikulum, pelatihan guru, dan pengawasan di Indonesia. Dalam metode penelitian ini, kami menganalisis kebijakan pendidikan yang telah diterapkan oleh pemerintah, serta mengumpulkan data dari berbagai sumber termasuk survei, wawancara, dan literatur terkait. Hasil penelitian ini menyoroti pentingnya alokasi anggaran yang memadai, regulasi yang efektif, kurikulum yang relevan, pelatihan guru yang berkelanjutan, dan pengawasan yang ketat sebagai faktor-faktor kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Penelitian ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana pemerintah dapat berperan dalam mengoptimalkan sistem pendidikan untuk mencapai masa depan yang lebih cerah.

Kata Kunci: Peran Pemerintah; Kualitas Pelayanan; Pelayanan Pendidikan

ABSTRACT

This research discusses the crucial role of the government in advancing the quality of education services as the background for the need for quality education for the progress of a nation. The purpose of this research is to investigate the role of the government in the context of education, including financing, regulation, curriculum, teacher training, and supervision in Indonesia. In this research method, we analyze education policies implemented by the government and gather data from various sources, including surveys, interviews, and related literature. The results of this research highlight the importance of adequate budget allocation, effective regulation, relevant curriculum, sustainable teacher training, and strict supervision as key factors in improving the quality of education services. This research provides valuable insights into how the government can play a role in optimizing the education system for a brighter future.

Keywords: Government Role; Service quality; Education Services

PENDAHULUAN

Peran pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan adalah topik yang sangat penting dalam konteks sistem pendidikan Indonesia (Akbar & Picard, 2019; Akib et al., 2016; Sulistyowati, 2021) staff/employee, students, and alumni. Indonesia, sebagai negara yang padat penduduk dan beragam, menghadapi berbagai tantangan dalam menyediakan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas tinggi kepada warganya. Tantangan-tantangan ini meliputi masalah seperti distribusi sumber daya pendidikan yang tidak merata, tingkat kompetensi guru yang bervariasi, kurikulum yang ketinggalan zaman, dan kurangnya mekanisme regulasi yang efektif (Dewi et al., 2017; Toprak, 2020).

Dalam mengatasi permasalahan ini, beberapa kerangka teoritis telah diusulkan untuk memahami peran pemerintah dalam pendidikan (Dilulio Jr, 1994; Eltrudis & Monfardini, 2020; Geissinger et al., 2019; Khan et al., 2020; McCarter et al., 2022; Zhu, 2014). Teori tata kelola pendidikan menekankan tanggung jawab pemerintah dalam menetapkan kebijakan, mengalokasikan sumber daya, dan memastikan efektivitas keseluruhan sistem pendidikan (Akib & Thukiman, 2020). Selain itu, Teori Modal Manusia mengatakan bahwa investasi dalam pendidikan, yang difasilitasi oleh kebijakan dan inisiatif pemerintah, memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan ekonomi (Syam et al., 2018).

Meskipun pemerintah Indonesia telah melakukan upaya besar untuk meningkatkan sistem pendidikannya, diperlukan penilaian komprehensif terhadap efektivitas intervensi pemerintah. Studi-studi terbaru menyoroti perlunya analisis yang lebih mendalam mengenai peran pemerintah, termasuk keterlibatan keuangan, kapasitas regulasi, pengembangan kurikulum, program pelatihan guru, dan mekanisme pemantauan (Gonzalez & Pelayo, 2022).

METODE

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendalami peran pemerintah dalam mendorong kualitas pelayanan pendidikan di Indonesia. Pendekatan kualitatif akan memungkinkan kami untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang konteks, persepsi, dan pengalaman individu terkait peran pemerintah dalam pendidikan (Creswell & Clark, 2017).

Informan Penelitian

Informan penelitian dalam penelitian ini terdiri dari berbagai pihak yang memiliki keterkaitan dengan sistem pendidikan di Indonesia. Ini termasuk pejabat pemerintah di tingkat pusat dan daerah yang terlibat dalam perumusan dan implementasi kebijakan pendidikan, guru, siswa, orang tua siswa, dan mungkin juga pemangku kepentingan lainnya seperti anggota masyarakat, LSM, dan akademisi. Pemilihan informan dilakukan secara purposive untuk memastikan representasi yang baik dari berbagai perspektif yang relevan dalam konteks pendidikan Indonesia.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*in-depth interviews*) dengan informan-informan yang relevan. Wawancara dipandu oleh panduan wawancara yang dirancang sebelumnya, yang akan mencakup pertanyaan terkait peran pemerintah dalam pendidikan. Selain itu, data dikumpulkan melalui analisis dokumen kebijakan pendidikan yang relevan, laporan-laporan pemerintah, dan literatur terkait.

Analisis Data

Data kualitatif yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan analisis konten (*content analysis*). Proses analisis akan

melibatkan pengkodean data, pengelompokan temuan-temuan, dan penyusunan pola-pola temuan yang muncul dari wawancara dan dokumen-dokumen yang dianalisis. Analisis ini akan membantu kami untuk mengidentifikasi pola-pola terkait peran pemerintah dalam mendorong kualitas pelayanan pendidikan, serta memahami dampak kebijakan dan praktik yang ada.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menyuguhkan wawasan yang mendalam mengenai peran pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di Indonesia. Penelitian ini mengarahkan perhatian pada beberapa dimensi utama peran pemerintah dalam sistem pendidikan, yaitu pembiayaan, regulasi, kurikulum, pelatihan guru, dan pengawasan, dengan tujuan mengidentifikasi sejauh mana pemerintah telah berkontribusi pada pembenahan sektor pendidikan di negara ini.

Pembiayaan pendidikan menjadi fokus awal penelitian ini. Temuan menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah meningkatkan alokasi anggaran untuk pendidikan, menggambarkan komitmen untuk mengatasi tantangan kekurangan sumber daya yang telah lama menjadi permasalahan dalam sistem pendidikan. Namun, penting untuk mencatat bahwa masih terdapat kendala dalam efisiensi penggunaan dana tersebut dan dalam mendistribusikannya secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Beberapa daerah, terutama yang terpencil, masih menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar pendidikan.

Regulasi adalah unsur penting lainnya dalam upaya pemerintah untuk mendorong kualitas pendidikan. Meskipun terdapat kerangka kerja regulasi yang ada, perlu diperkuat dan diperbarui secara teratur agar tetap relevan dan efektif. Peningkatan regulasi akan membantu memastikan bahwa kebijakan-

kebijakan pendidikan dapat dijalankan dengan baik, menghindari praktik-praktik yang merugikan, dan menjaga standar kualitas pendidikan.

Selanjutnya, kurikulum adalah aspek kunci dalam pendidikan. Penelitian ini mengidentifikasi perlunya pembaruan kurikulum agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Hal ini akan memungkinkan siswa untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang relevan dan berdaya saing dalam era globalisasi.

Pelatihan guru juga menjadi sorotan dalam penelitian ini. Guru adalah salah satu komponen terpenting dalam sistem pendidikan. Dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan, program pelatihan guru harus diperbaiki dan diperbarui sesuai dengan perkembangan terkini dalam pendidikan. Selain itu, insentif yang ditawarkan kepada guru perlu disesuaikan agar dapat mendorong mereka untuk meningkatkan kinerja dan berkontribusi secara positif pada proses pembelajaran.

Pengawasan yang ketat merupakan langkah penting dalam memastikan pelaksanaan kebijakan pendidikan yang efektif. Mekanisme pengawasan perlu dikembangkan dan diperkuat untuk memastikan bahwa standar pendidikan terpenuhi dan setiap penyimpangan dapat ditindaklanjuti dengan cepat. Pengawasan yang baik juga dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam penggunaan dana pendidikan.

Sementara temuan-temuan ini menggambarkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, masih ada tantangan yang harus diatasi. Selain faktor kebijakan, masalah sosial, ekonomi, dan budaya juga memengaruhi efektivitas peran pemerintah dalam pendidikan. Untuk mencapai hasil yang lebih positif, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya perlu ditingkatkan. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pendidikan juga

dapat membantu mengatasi masalah yang ada.

Dalam konteks masa depan, penelitian ini memberikan pandangan yang kaya dan mendalam tentang bagaimana pemerintah dapat terus berperan dalam mendorong kualitas pelayanan pendidikan di Indonesia. Rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat menjadi panduan bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang lebih efektif dan merata, sehingga sistem pendidikan Indonesia dapat bergerak menuju masa depan yang lebih cerah dan lebih berkualitas.

Penelitian ini telah memberikan wawasan yang penting tentang peran pemerintah dalam mendorong kualitas pelayanan pendidikan di Indonesia. Hasil penelitian ini mencerminkan berbagai aspek yang relevan dalam konteks pendidikan di negara ini, termasuk pembiayaan, regulasi, kurikulum, pelatihan guru, dan pengawasan.

Dalam hal pembiayaan pendidikan, temuan penelitian menggambarkan komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan alokasi anggaran pendidikan. Ini sejalan dengan pemahaman bahwa pembiayaan yang memadai adalah prasyarat penting untuk meningkatkan mutu pendidikan (Agustin & Arza, 2019; Gunter, 2018; Renfrew et al., 2021; Rieckmann, 2017; Syam et al., 2018; Weber et al., 2022). Namun, perlu ditekankan bahwa pentingnya alokasi anggaran yang cukup harus diimbangi dengan upaya untuk memastikan penggunaannya secara efisien dan distribusi yang merata di seluruh wilayah (Chong et al., 2016; Datzberger, 2018; Foo, 2013; Maravilla et al., 2022; Munna, 2021; Usman, 2017; Yera et al., 2020).

Regulasi adalah aspek lain yang memiliki dampak signifikan dalam perbaikan kualitas pendidikan. Temuan ini mencerminkan pentingnya memperkuat dan memperbarui regulasi pendidikan secara berkala agar tetap relevan dan efektif dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan pendidikan (El Mhouti & Erradi, 2018; Mishra et al., 2020; Zhou et

al., 2021). Regulasi yang kuat dapat membantu mencegah penyimpangan dan memastikan bahwa standar kualitas pendidikan terpenuhi.

Kurikulum yang relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat adalah landasan penting dalam penyediaan pendidikan berkualitas. Hasil penelitian ini menggarisbawahi perlunya pembaruan kurikulum untuk memastikan bahwa siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan masa kini (Başkan, 2020; Dewi, 2017; Holmes, 1931). Pembaruan kurikulum juga harus memperhatikan konteks lokal agar pendidikan menjadi lebih relevan.

Pengembangan dan pelatihan guru adalah komponen kunci dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan. Temuan penelitian ini mengakui pentingnya investasi dalam pengembangan profesional guru (Lattouf, 2022). Program pelatihan guru yang berkualitas akan memberikan dampak positif pada kemampuan pengajaran mereka, yang selanjutnya akan berdampak pada hasil belajar siswa (Cremin & Nakabugo, 2012).

Pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan adalah upaya penting untuk memastikan bahwa program-program pendidikan berjalan sesuai standar (Ferguson & Marvin, 2017). Pengawasan yang baik juga dapat membantu mengidentifikasi penyimpangan dan memungkinkan tindakan korektif yang cepat.

Dalam konteks keseluruhan, temuan penelitian ini memberikan landasan yang kuat bagi pemerintah Indonesia untuk terus meningkatkan peran mereka dalam mendorong kualitas pelayanan pendidikan. Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, peningkatan transparansi, dan akuntabilitas yang lebih baik akan menjadi faktor penting dalam mencapai hasil yang lebih positif di masa depan. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan untuk merumuskan kebijakan-

kebijakan yang lebih efektif dan merata dalam bidang pendidikan, sehingga menciptakan sistem pendidikan yang lebih berkualitas dan berkelanjutan di Indonesia.

KESIMPULAN

Peran pemerintah dalam mendorong kualitas pelayanan pendidikan di Indonesia sangat penting dan multifaset. Temuan menekankan pentingnya alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung sistem pendidikan yang berkelanjutan, serta perluasan dan penguatan regulasi pendidikan yang dapat menjaga standar kualitas yang tinggi. Pembaruan kurikulum yang relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat juga menjadi langkah kunci dalam memberikan pendidikan yang lebih bermakna. Demikian pula, pelatihan guru yang berkelanjutan dan berkualitas tinggi adalah investasi yang esensial dalam meningkatkan kinerja pendidikan. Terakhir, pengawasan yang ketat adalah bagian integral dari upaya memastikan bahwa kebijakan pendidikan dijalankan dengan baik dan layanan pendidikan berada pada tingkat kualitas yang diharapkan. Penelitian ini memberikan pandangan yang mendalam tentang pentingnya peran pemerintah dalam mengoptimalkan sistem pendidikan, dengan tujuan akhir mencapai masa depan pendidikan yang lebih cerah dan berkualitas bagi masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Agustin, H., & Arza, F. I. (2019). Potrait of Accountability and Transparency in Local Budget Management by the Regional Government in West Sumatera Province, Indonesia: An Anomaly in Digital Era. *4th Padang International Conference on Education, Economics, Business and Accounting (PICEEBA-2 2019)*. Padang, 154–166.

Akbar, A., & Picard, M. (2019). Understanding plagiarism in Indonesia from the lens

of plagiarism policy: Lessons for universities. *International Journal for Educational Integrity*, 15(1). <https://doi.org/10.1007/s40979-019-0044-2>

Akib, H., Guntur, M., & Salam, R. (2016). Perception of Civitas Academic about Blissful Service for Recipient at PostGraduate Progr“am State University of Makassar, Indonesia,.” *Paper Presented at International Conference of Public Organization (ICONPO) VI*, 340–350.

Akib, H., & Thukiman, K. (2020). *International Journal of Educational Administration, Management, and Leadership Archive Management Analysis in Secondary School : A Case Study in Indonesia*. 1(1), 1–6.

Başkan, B. (2020). Toxic Leadership in Education. *International Journal of Educational Administration, Management, and Leadership*, 97–104.

Chong, M. C., Francis, K., Cooper, S., Abdullah, K. L., Hmwe, N. T. T., & Sohod, S. (2016). Access to, interest in and attitude toward e-learning for continuous education among Malaysian nurses. *Nurse Education Today*, 36, 370–374. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.nedt.2015.09.011>

Cremin, P., & Nakabugo, M. G. (2012). Education, development and poverty reduction: A literature critique. *International Journal of Educational Development*, 32(4), 499–506.

Creswell, J. W., & Clark, V. L. P. (2017). *Designing and conducting mixed methods research*. Sage publications.

Datzberger, S. (2018). Why education is not helping the poor. Findings from Uganda. *World Development*, 110(2018), 124–139. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.05.022>

Dewi, E. M. P. (2017). Teacher Psychological Readiness Analysis in the Implementation of Inclusive Education at Junior High

- School of 18 Malang. *International Journal of Science and Research (IJSR)*, 6(10), 1744–1746. <https://doi.org/10.21275/16101707>
- Dewi, E. M. P., Djalal, N. M., & Siswanti, D. N. (2017). The Influence Of “Edufair” Psychoeducation To Improve Student Career Maturity At Y Senior High School Of Makassar. *International Conference on Education, Science, Art and Technology, July*, 75–87.
- Dilulio Jr, J. D. (1994). Principled agents: The cultural bases of behavior in a federal government bureaucracy. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 4(3), 277–318.
- El Mhouti, A., & Erradi, M. (2018). Towards a smart learning management system (smart-LMS) to improve collaborative learning in higher education. *ACM International Conference Proceeding Series*. <https://doi.org/10.1145/3286606.3286784>
- Eltrudis, D., & Monfardini, P. (2020). Are Central Government Rules Okay? Assessing the Hidden Costs of Centralised Discipline for Municipal Borrowing. *Sustainability*, 12(23), 9932.
- Ferguson, Y. I., & Marvin, H. (2017). *Chapter 9 - Critical Friendship for Librarians: Striving Together for Scholarly Advancement* (D. B. T.-B. M. Lowe-Wincentsen (ed.); pp. 107–124). Chandos Publishing. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-08-101294-9.00009-X>
- Foo, K. Y. (2013). A vision on the role of environmental higher education contributing to the sustainable development in Malaysia. *Journal of Cleaner Production*, 61, 6–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.05.014>
- Geissinger, A., Laurell, C., Sandström, C., Eriksson, K., & Nykvist, R. (2019). Digital entrepreneurship and field conditions for institutional change—Investigating the enabling role of cities. *Technological Forecasting and Social Change*, 146(November 2017), 877–886. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2018.06.019>
- Gonzalez, C., & Pelayo, E. J. U. (2022). The Mediating Effect of Leader Accountability on the Relationship between Transcendental Leadership of School Heads and Teacher Self-Efficacy. *International Journal of Educational Administration, Management, and Leadership*, 3(2), 83–104. <https://doi.org/10.51629/ijeamal.v3i2.89>
- Gunter, H. M. (2018). Depoliticisation and education policy. In *Challenges for Public Education*. <https://doi.org/10.4324/9780429436765-7>
- Holmes, R. W. (1931). Graduate Education of Physicians in Obstetrics. *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, 21(6), 809–827. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0002-9378\(15\)30547-0](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0002-9378(15)30547-0)
- Khan, S., Umer, R., Umer, S., & Naqvi, S. (2020). Antecedents of trust in using social media for E-government services: An empirical study in Pakistan. *Technology in Society*, 101400. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2020.101400>
- Lattouf, O. M. (2022). Impact of digital transformation on the future of medical education and practice. *Journal of Cardiac Surgery*, 37(9), 2799–2808. <https://doi.org/10.1111/jocs.16642>
- Maravilla, J., Catiwa, J., Guariño, R., Yap, J. F., Pagatpatan, C., Orolfo, D. D., de Silos, J., Leigh, M. C., Babate, J., & Lopez, V. (2022). Exploring indirect impacts of COVID-19 on local health systems from the perspectives of health workers and higher education stakeholders in the Philippines using a phenomenological approach. *The Lancet Regional Health*

- *Western Pacific*, 100585. <https://doi.org/10.1016/j.lanwpc.2022.100585>
- McCarter, M. W., Haeruddin, M. I. M., Mustafa, M. Y., Abadi, R. R., & Syahrul, K. (2022). How work discipline and leadership influence employees' performance? *International Journal of Educational Administration, Management, and Leadership*, 3(1), 17–26. <https://doi.org/10.51629/ijeamal.v3i1.73>
- Mishra, L., Gupta, T., & Shree, A. (2020). Online teaching-learning in higher education during lockdown period of COVID-19 pandemic. *International Journal of Educational Research Open*, 1, 100012.
- Munna, A. S. (2021). *International Journal of Educational Administration, Management, and Leadership COVID-19 and Sustainability in Higher Education: Reflective Review*. 2(1), 1–4.
- Renfrew, M. J., Bradshaw, G., Burnett, A., Byrom, A., Entwistle, F., King, K., Olayiwola, W., & Thomas, G. (2021). Sustaining quality education and practice learning in a pandemic and beyond: 'I have never learnt as much in my life, as quickly, ever.' *Midwifery*, 94, 102915. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2020.102915>
- Rieckmann, M. (2017). *Education for sustainable development goals: Learning objectives*. Unesco Publishing.
- Sulistiyowati, W. K. (2021). Implementation of Legal Aid to Debtors Due to Arrears in Motor Vehicle Installments Executed by Debt Collectors as Impact of the Covid-19 Pandemic. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 3(4), 445–464.
- Syam, A., Hasbiah, S., Yunus, M., & Akib, H. (2018). Determinants of entrepreneurship motivation for students at educational institution and education personnel in Indonesia. *Journal of Entrepreneurship Education*, 21(2).
- Toprak, M. (2020). Leadership in Educational. *International Journal of Educational Administration, Management, and Leadership*, 1(2), 85–96. <https://doi.org/10.51629/ijeamal.v1i2.10>
- Usman, A. (2017). Influence of Motivation on the Performance of Government Employees. *2nd International Conference on Education, Science, and Technology (ICEST 2017)*.
- Weber, M. A., Backer, T. E., & Brubach, A. (2022). Creating the HHS COVID-19 Public Education Media Campaign: Applying Systems Change Learnings. *Journal of Health Communication*, 27(3), 201–207. <https://doi.org/10.1080/10810730.2022.2067272>
- Yera, A., Arbelaitz, O., Jauregui, O., & Muguerza, J. (2020). Characterization of e-Government adoption in Europe. *PLOS ONE*, 15(4), e0231585. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0231585>
- Zhou, B., Calkins, C., Jayaraman, T., Cassells, S., Rotto, T., Vaughan, L., Srinivasan, M., & Schillinger, E. (2021). Implementing Value-Added Medical Education: Lessons Learned From the Student-Initiated Stanford Frontline COVID-19 Consult Service. *Academic Medicine*, 96(12), 1690–1695. <https://doi.org/10.1097/acm.0000000000004160>
- Zhu, X. (2014). Mandate versus championship: Vertical government intervention and diffusion of innovation in public services in authoritarian China. *Public Management Review*, 16(1), 117–139.